

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

“Implementasi Program Loker Prioritas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II”

---

#### INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan :  
Jabatan Informan : Kepala Bagian Urusan Umum  
Hari dan Tanggal :

#### Pertanyaan

##### A. Sumber Daya

1. Berapa jumlah SDM/pegawai di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, terkait dengan pelaksana layanan Loker Prioritas? apakah mencukupi?
2. Bagaimana cara Kantor Pertanahan Kota Suarabaya II dalam melakukan kegiatan sosialisasi program layanan Loker Prioritas kepada masyarakat?
3. Bagaimana proses ditunjuknya Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk melaksanakan program layanan Loker Prioritas ini?
4. Menurut anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program layanan Loker Prioritas?

##### B. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak intern dalam pelaksanaan program layanan Loker Prioritas?

2. Apakah pembagian unit kerja di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini sudah jelas dalam pelaksanaan program layanan Loker Prioritas?
3. Apakah pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah memberikan perintah yang jelas kepada staf pelaksana dalam melaksanakan program layanan Loker Prioritas ini?

### **C. Disposisi (sikap)**

1. Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi pelaksana program Loker Prioritas?
2. Bagaimana cara pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II agar program layanan Loker Prioritas dapat berjalan sesuai tujuan?

### **D. Struktur Birokrasi**

1. Apa SOP Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melaksanakan program Loker Prioritas?
2. Bagaimana strategi / target kerja yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam implementasi program layanan Loker Prioritas ini?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

“Implementasi Program Loker Prioritas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II”

---

### **INFORMAN PENELITIAN**

Nama Informan :

Jabatan Informan : Staf/Pegawai Pelaksana

Hari dan Tanggal :

Pertanyaan

#### **A. Sumber Daya**

1. Bagaimana kesiapan anda selaku staf pelaksana dalam program layanan Loker Prioritas ini?
2. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program layanan Loker Prioritas ini sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
3. Kewenangan apa saja yang anda dapat dari pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melayani masyarakat?
4. Menurut anda, apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?

#### **B. Komunikasi**

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan staf pelaksana dengan Kantor Pertanahan Kota Suarabaya II agar program Loker Prioritas dapat berjalan sesuai tujuan?
2. Menurut anda apa dampak positif dan mengapa perlu dilaksanakannya program layanan Loker Prioritas ini?

### **C. Disposisi (sikap)**

1. Apakah staf pelaksana memahami segala keluhan masyarakat dan mampu untuk menanggapi?
2. Bagaimana cara pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II agar program layanan Loker Prioritas dapat berjalan sesuai tujuan?

### **D. Struktur Birokrasi**

1. Apa SOP Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melaksanakan program Loker Prioritas?
2. Apakah ada sanksi atau hukuman yang berlaku apabila staf pelaksana berperilaku tidak disiplin?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

“Implementasi Program Loker Prioritas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II”

---

### **INFORMAN PENELITIAN**

Nama Informan :

Jabatan Informan : Masyarakat/Pemohon

Hari dan Tanggal :

#### **Pertanyaan**

1. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan staf pelaksana?
2. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang program layanan Loker Prioritas?
3. Apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sudah berjalan dengan baik?
4. Menurut anda, apakah fasilitas yang tersedia sudah cukup baik?
5. Menurut anda, apa dampak positif yang anda rasakan dengan adanya program ini?
6. Menurut anda, apakah setuju dengan adanya program Loker Prioritas ini?
7. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam pelayan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II?
8. Apakah staf pelaksana dalam melayani telah memberikan prosedur yang sesuai?
9. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program Loker Prioritas?

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya Telp. 031 – 3531476, Fax : 031 - 3531477

Surabaya, 10 Maret 2023

Nomor : UP.02.03/672.1/100-35.80/III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
di  
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 0587/K/FISIP/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Surat Permohonan Observasi atas nama :

Nama : Yusuf Ramadhan Adikara  
NIM : 1111900181  
Program Studi : S1 Administrasi Negara

maka dengan ini kami memberikan izin kegiatan Observasi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selama 2 bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 10 Mei 2023.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Surabaya II  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Ub,  
Koordinator Kelompok Substansi Umum  
dan Kepegawaian  
  
Budiarto, SE., SH.  
NIP. 196903091998031002



### Lampiran 3. Kartu Bimbingan

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Hukum • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 J. Semolowara 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsp@untag-sby.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yusuf Ramadhan Adikara  
 NBI : 1111900181  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM  
 Dosen Pembimbing II : Eddy Wahyudi, SH, M.Si  
 Judul Skripsi : Implementasi Program Loket Prioritas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

No	Tanggal	Surat/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
1	15/02/2021	Proposal Ase of basis	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	22/02/21	Proposal Ase	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	01/03/21	Pedoman Wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	24/03/21	Bab I. revisi dan perbaikan H. pendahuluan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	12/04/21	Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	18/04/21	Bab II revisi dan koreksi keparagraf awal keparagraf	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	10/05/2021	Melampirkan Bab dan Bab keparagraf	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Hukum • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 J. Semolowara 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsp@untag-sby.ac.id

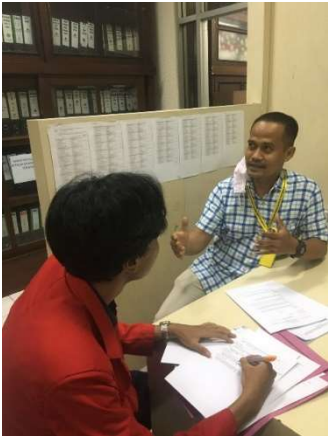
No	Tanggal	Surat/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
8	16/07/2021	Surat V: Revisi keparagraf dan Survei hasil Survei awal dan revisi keparagraf	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	22/08/2021	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	24/08/2021	Ase	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Catatan:  
 1. Kartu Bimbingan di atas saat bimbingan  
 2. Kartu bimbingan di atas oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai  
 Tanggal 24-05-2021

Dosen Pembimbing I: *[Signature]* Dosen Pembimbing II: *[Signature]*

**Lampiran 4. Dokumentasi**





## Lampiran 5. Lembar Perintah Revisi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

---

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Yusuf Ramadhan Adikara

NIM : 1111900181

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

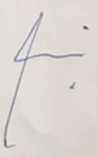
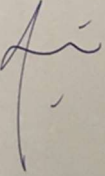
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

(  ) (  )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Yusuf Ramadhan Adikara

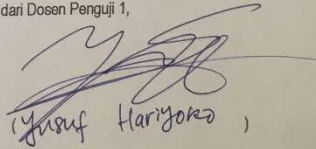
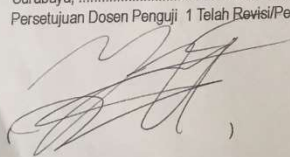
NIM : 1111900181

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

1. Data sekunder tidak jelas dan tidak lengkap
2. Pembahasan tidak ada analisis
3. Gunakan mendeley secara benar
4. OPSI lain selain Implementasi

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,



Yusuf Hariyanto

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Yusuf Ramadhan Adikara

NIM : 1111900181

Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 22 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

*Cari aturan hukum nyz dulu.*

Surabaya, 22 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,  
( *[Signature]* ) ( *[Signature]* )  
( Inas M. )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 6. Bukti LoA

---



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



---

**PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik**

**1/07/2023/#1000**

**L.o.A**

**18/05/2023**

Kepada  
**YUSUF RAMADHAN ADIKARA**  
[adikarayusuframa@gmail.com](mailto:adikarayusuframa@gmail.com);  
**RACHMAWATI NOVARIA**  
[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id);  
**EDDY WAHYUDI**  
[ediwahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ediwahyudi@untag-sby.ac.id);

Di  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
**INDONESIA**

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI PROGRAM LOKET PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, yang diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2023: Volume 3, No. 04 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

---

Editor in Chief,  
**Kusnan**  
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik  
<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>



## Lampiran. 7 Jurnal & Hasil Turnitin Jurnal

### IMPLEMENTASI PROGRAM LOKET PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

#### **Yusuf Ramadhan Adikara**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[adikarayusuframa@gmail.com](mailto:adikarayusuframa@gmail.com)

#### **Rachmawati Novaria**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id)

#### **Eddy Wahyudi**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ediwahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ediwahyudi@untag-sby.ac.id)

#### **Abstrak**

Sertifikat tanah ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), sebuah instansi pemerintah yang ada di bidang agraria atau pertanahan. Sejak 2013 Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan reformasi birokrasi adalah melalui layanan Loker Prioritas, pelayanan ini dikhususkan bagi pemohon yang mengurus sendiri tanpa kuasa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C Edward III. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi layanan Loker Prioritas sudah terbilang baik, tetapi masih mengalami sebagian kendala seperti fasilitas gedung yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II masih terlalu kecil dan lahan parkir yang sempit.

**Kata Kunci:** *Sertifikat Tanah, Kantor Pertanahan, Implementasi Kebijakan, Loker Prioritas.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kota Surabaya adalah kota yang telah menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya yang memiliki julukan sebagai Kota Metropolitan merupakan kota yang paling besar dengan urutan ke-2 di negara Indonesia sesudah kedudukan Kota Jakarta. Kota Surabaya memiliki letak pada bagian utara dari Pulau Jawa dengan berhadap-hadapan pada Laut Jawa dan Selat Madura di sebelah timur. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 Km<sup>2</sup> serta memiliki jumlah penduduk 2.848.583 jiwa yang menjadikan Kota Surabaya melahirkan satu dari banyak kota yang mana masyarakatnya mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Surabaya juga merupakan salah satu kota yang menjadi pusat segala aktivitas di provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2017 dalam standar pelayanan pasal 1 ayat 2 yang mengatur tentang terselenggaranya tertib administrasi di bidang pertanahan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Titik kunci utama strategi publik untuk negara mutakhir merupakan administrasi publik, yang adalah jenis administrasi, baik sebagai tenaga kerja terbuka maupun produk yang pada tingkat dasar merupakan kewajiban dan dilakukan oleh negara untuk mengikuti atau mengerjakan negara. kepuasan pribadi individu. Dalam prakteknya, kebijakan dalam pelayanan publik ini semestinya direduksi melalui serangkaian dalam pelaksanaan serta petunjuk teknis internal birokrasi. Sementara itu, yang krusial dari sudut pandang masyarakat merupakan adanya standar dalam pelayanan publik, yang menentukan kepada masyarakat jenis-jenis pelayanan yang telah menjadi haknya, siapa yang dapat menerimanya, syarat-syarat yang harus dipenuhinya, dan bagaimana mereka disediakan.

Sertifikat tanah ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), sebuah instansi pemerintah yang ada di bidang agraria atau pertanahan. Sejak 2013, Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk mencapai Good Governance dengan melakukan pembaruan dan perubahan struktur administrasi badan pertanahan secara mendasar. Aspek pelayanan publik di bidang pertanahan merupakan salah satu reformasi yang dilaksanakan oleh BPN. Tantangan bagi BPN adalah menghilangkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan BPN memakan waktu, rumit, dan memerlukan perubahan segera untuk KKN. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan BPN merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan pertanahan menunjukkan hal tersebut. Proses penerbitan sertifikat tanah merupakan pelayanan yang sering dikritik. Orang membayar berbagai biaya untuk mendapatkan sertifikat sebidang tanah, dan prosesnya rumit.

Kesanggupan dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan reformasi birokrasi adalah melalui layanan Loker Prioritas, pelayanan ini dikhususkan bagi pemohon yang mengurus sendiri tanpa kuasa. Setiap hari, program ini dilakukan. Keinginan untuk program ini adalah untuk mengurangi peraturan dan administrasi yang lama. Selain itu dengan adanya program layanan Loker Prioritas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan hemat biaya kepada masyarakat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam kebijakan yang biasa, implementasi selalu menyertakan satu instansi karena berperan sebagai pelaksana, seperti kebijakan dalam organisasi dalam merubah cara pengukuran kinerja pegawai. Kemudian lagi, untuk pendekatan skala besar, misalnya kebijakan pengurangan kebutuhan di daerah pedesaan, upaya pelaksanaan akan mencakup lembaga lain, misalnya pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

Dalam literatur ilmu kebijakan terjadi sebagian metode implementasi kebijakan publik cukup normal digunakan. Dalam sebagian jenis implementasi kebijakan yang disuarakan oleh teori George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **Sumber daya**

Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas merupakan indikator implementasi kebijakan yang dinilai dari faktor sumber daya.

### **Komunikasi**

Transmisi, kejelasan, dan konsistensi merupakan indikator implementasi kebijakan yang dinilai dari faktor komunikasi.

### **Disposisi**

Pengangkatan birokrasi dan insentif merupakan indikator implementasi kebijakan yang dinilai dari faktor disposisi.

### **Struktur birokrasi**

Standar Operating Prosedur dan fragmentasi merupakan indikator implementasi kebijakan yang dinilai dari faktor struktur birokrasi.

## **C. METODE**

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian yang memakai metode kualitatif deskriptif. Data yang ada dilapangan secara alamiah dikumpulkan dengan tujuan dapat menafsir fenomena dan permasalahan yang terjadi dengan penelitian menjadi instrumen kunci yang merupakan metode dari penelitian kualitatif (Effendi,

2012). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Implementasi Pelayanan Loker Prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang akan digambarkan oleh peneliti ini.

Tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II. Kantor BPN ini berada Jl. Krembangan Barat No.57, Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut yaitu adanya ketertarikan dengan beberapa informasi dari masyarakat mengenai pelayanan administrasi surat tanah di Kota Surabaya.

Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan data primer. Secara spesifik karakteristik informan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
2. Staf pelaksana Loker Prioritas Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
3. Masyarakat/pemohon (3 orang).

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan berdasarkan dokumen, foto, gambar, dan sumber lain terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data bersifat induktif dan berkelanjutan. Maksudnya adalah suatu proses untuk menyusun dan menemukan data secara sistematis. Data tersebut didapatkan melalui catatan lapangan, hasil wawancara dan lainnya agar lebih mudah di mengerti dan dapat di informasikan. Menurut Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga langkah: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pelaksana melakukan berbagai kegiatan selama implementasi kebijakan untuk mencapai hasil akhir yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis. Hakikat pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan terencana dan bertahap yang dilakukan oleh badan pelaksana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008. Dalam bentuk aktivitas implementasi melalui kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam program Loker Prioritas merupakan layanan yang memberlakukan tanpa kuasa untuk dapat menanyakan keluhan atau informasi seputar pertanahan dengan biaya yang dapat dijangkau tanpa menggunkan jasa pengurusan. Jenis pelayanan yang ditangani seperti pengecekan sertifikat tanah, penghapusan hak tanggungan (roya), peralihan, pembebanan hak tanggungan dan lain-lain.



Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang didapat, maka dapat diketahui pelaksanaan Program Loker Prioritas oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan menggunakan indikator teori implementasi kebijakan oleh George Edward III (1980,1) sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya**

Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Surabaya II merasa kebijakan tersebut sudah efektif dalam pelaksanaan program Loker Prioritas ini tetapi untuk jumlah staf/pegawai dalam melayani masyarakat surabaya itu kurang. Tetapi bagi Kantor Pertanahan Kota Surabaya II itu bukan jadi alasan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini masyarakat surabaya cukup puas dari pelayanan yang sudah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II hal ini diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat yang sedang mengurus surat-surat tanahnya melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat disimpulkan sebenarnya staf/pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini dikatakan baik dalam melayani masyarakat surabaya.

Pada praktek di lapangan pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II maupun Pemerintah Pusat masih kurang berupaya untuk melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang program Loker Prioritas ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor dalam sosialisasi program hanya menggunakan media massa, media sosial, radio suara surabaya, sosialisasi ditempat car free day dan brosur. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dalam hal ini tidak menerima informasi yang memadai oleh pemerintah, meskipun faktanya masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan informasi tentang program Loker Prioritas ini.

Kementrian ATR/BPN memiliki kewenangan, yaitu melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan implementasi program Loker Prioritas di setiap Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis penerapan program Loker Prioritas, dan fasilitas pelaksanaan penerapan program ini. Dalam hal ini hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat merasa puas dengan wewenang yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan pelayanan yang baik. Pihak pemerintah pusat maupun kantah dalam hal ini telah menjalankan kewenangan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi pokok masing-masing dengan menggunakannya seefektif mungkin. Agar implementasi kebijakan program Loker Prioritas ini dapat efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Akan terjadi hal yang wajar untuk implementasi sebuah kebijakan yakin untuk memerlukan fasilitas pendukung dalam kesuksesan dari implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, untuk fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II seperti komputer, jaringan internet, dan loket itu sudah cukup baik tetapi untuk gedung itu sendiri masih kurang memadai dalam melayani masyarakat. Masyarakat pun juga merasakan bahwa gedung di

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini terlalu kecil dan lahan tempat parkir juga masih kurang memadai. Kondisi seperti ini bukan menjadi penghambat untuk pelayanan yang akan diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terbukti dengan hasil wawancara ke masyarakat pelayanan yang telah diberikan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini cukup memuaskan.

## **2. Komunikasi**

Berdasarkan hasil analisis, Kementerian ATR/BPN menetapkan program Loker Prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menciptakan program layanan Loker Prioritas, program Loker Prioritas adalah layanan yang memberlakukan tanpa kuasa untuk dapat menanyakan keluhan atau informasi seputar pertanahan dengan biaya yang dapat dijangkau tanpa menggunkan jasa pengurusan. Dalam hal ini para staf/pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah diberi pembekalan sehingga memahami apa tujuan dan fungsi dari program Loker Prioritas itu sendiri dan setiap minggunya ada evaluasi agar dapat mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan staf/pegawai pelaksana terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Akibatnya untuk penyajian informasi yang telah di beri akhirnya akan membuat tepat sasaran serta akan bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari program Loker Prioritas ini yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahannya sendiri tanpa kuasa. Menurut hasil wawancara dan observasi bisa digambarkan bahwa dalam komunikasi mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini sudah cukup baik.

Program layanan Loker Prioritas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini di laksanakan sejak pertengahan tahun 2022. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Kantor Pertanahan Kota Surabaya II buka setiap harinya senin-jum'at jam 08.00-14.00 dan sabtu-minggu jam 09.00-12.00, jadi tidak menjadi alasan untuk masyarakat yang tidak punya waktu dalam mengurus administrasi pertanahannya. Dalam hal ini layanan Loker Prioritas di laksanakan di Kota atau Kabupaten yang mendukung dari segi lokasi pelaksanaan.

## **3. Disposisi (sikap)**

Pemilihan serta pengangkatan staf/pegawai pelaksana kebijakan wajib orang-orang yang mempunyai loyalitas untuk kebijakan yang sudah diterapkan, lebih khususnya dalam keperluan masyarakat. Disposisi para pelaksana yang tidak ingin melakukan kebijakan yang sudah diterapkan tentu bisa memicu kegagalan dalam berhasilnya tujuan dari implementasi kebijakan. Kontribusi yang tinggi cukup diperlukan agar dapat terlaksananya implementasi kebijakan yang sangat baik. Jika staf/pegawai yang menangani layanan Loker Prioritas ini tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan ini maka akan terjadinya kegagalan. Dalam hal ini staf pelaksana memiliki dedikasi yang tinggi karena selama ini kemampuan dalam melayani masyarakat cukup baik terbukti dengan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat merasa puas dengan pelayanan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II ini. Semenjak ditunjuknya Bapak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria reformasi birokrasi benar-benar dilaksanakan.

Manipulasi insentif adalah satu dari cara dalam mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan. Sebagai aturan umum, individu bertindak berdasarkan keuntungan mereka sendiri, kemudian, pada saat itu, mengendalikan dorongan oleh pembuat strategi dapat berdampak pada aktivitas pelaksana strategi. Dimungkinkan untuk memotivasi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan benar dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu. Lain halnya dengan pelaksanaan program Locket Prioritas, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi. Karena dalam kebijakan ini 46 ialah kebijakan yang baru diterapkan yang dipastikan bisa mendatangkan antusias terhadap masyarakat dalam mengurus surat-surat pertanahannya sendiri tanpa kuasa.

Ini membuat para staf pelaksana bekerja di hari sabtu dan minggu dengan adanya kondisi sesuai ini staf/pegawai pelaksana diberinya uang tambahan untuk staf pelaksana memiliki semangat melayani masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan staf pelaksana yang bekerja di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Pemberian insentif kepada staf pelaksana diharapkan dapat melayani administrasi pertanahan tetap semangat serta melaksanakan pelayanan dengan sanagat seefektif mungkin kepada masyarakat surabaya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Ada dua jenis untuk bisa membantu kinerja birokrasi untuk implementasi program layanan Locket Prioritas ialah standar operasi prosedur (SOP) serta fragmentasi yang akan dapat menjadi metode dalam implementasi program layanan Locket Prioritas ini. Deskripsi mekanisme kegiatan program layanan Locket Prioritas dengan adanya Standar Operasi Prosedur implementasi sebuah kebijakan yang mengharuskan para pegawai atau staf pelaksana kebijakan dalam melakukan kewajibannya setiap hari setara dalam standar yang sudah diterapkan.

Secara acuan Standar Operasional Prosedur adalah bentuk yang penting untuk pelaksanaan prinsip manajemen kualitas yang dapat diterapkan dalam organisasi pemerintahan. Maka dari itu tidak seluruhnya prinsip-prinsip manajemen kualitas bisa dilaksanakan dalam Standar Operasi Prosedur dikarenakan bersifat instansi pemerintah, bertentangan dengan organisasi privat.

Istilah fragmentasi ada kaitannya dalam upaya pelaksanaan komitmen kegiatan-kegiatan serta kegiatan pegawai diantara unit. Fragmentasi dilaksanakan untuk memudahkan suatu kebijakan di implementasikan, oleh karena itu dilaksanakannya fragmentasi atau penjelasan kewenangan supaya tugas-tugas yang semestinya dilaksanakan dalam tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) semestinya seluruh kemampuan kinerja yang dilaksanakan stakeholder bisa di nilai dalam tingkat ke efektifannya serta apakah sudah berbanding dengan prosedurnya.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis maka bisa di simpulkan bahwa pelaksanaan implementasi program layanan Loker Prioritas ini mempunyai prosedur yang sudah di tentukan yang bertujuan supaya program ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang di inginkan.

Dan berikut adalah prosedur dalam perekrutan pegawai tidak tetap yang menangani dalam pelayanan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yaitu : a) Pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II membuat pendaftaran calon pegawai tidak tetap melalui adanya persyaratan yang sudah ditentukan;

b) Calon pegawai mendaftar dengan memenuhi persyaratan;

c) Pembekalan/pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai setelah diterima;

d) Setelah diberi pembekalan maka pegawai siap melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa implementasi program layanan Loker Prioritas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ini dapat dikatakan berhasil. Meskipun masih terjadi kendala fasilitas dan informasi tentang program layanan Loker Prioritas ini, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

## **E. KESIMPULAN**

Melalui hasil analisis penelitian yang telah dilaksanakan pada penulis melalui pelaksanaan implementasi program layanan Loker Prioritas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II saat penelitian tersebut bisa diberi kesimpulan bahwa untuk implementasi layanan Loker Prioritas bisa dikatakan cukup baik, akan tetapi masih ada sebagian permasalahan. Karena terlihat semenjak penerapan di lapangan yang terjadi sedang memperlihatkan kekurangan yang sedang dijalani oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Jenis penerapan implementasi melalui kebijakan Kementerian ATR/BPN mengenai program layanan Loker Prioritas ini ialah dalam memenuhi pelaksanaan administrasi surat pertanahan yang bisa diurus dengan sendiri tanpa kuasa. Target pemerintah dalam kebijakan implementasi program layanan Loker Prioritas ialah supaya terbentuknya tertatanya administrasi serta menjauhkan pengaruh negatif yang dilaksanakan dari pihak-pihak yang tidak konsekuensi yang bisa meruginya pemerintah serta masyarakat.

Pelayanan yang sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sudah menerapkan sistem pelayanan yang terbaik dan memang sudah diterapkan oleh pegawai/staff pelaksana dalam melayani masyarakat yang sedang mengurus surat tanahnya. Saran yang bisa di informasikan melalui peneliti dari hasil penelitian adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sekiranya melaksanakan komunikasi serta penyesuaian dengan pemerintah di kecamatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan program layanan Loker Prioritas supaya tidak terjadinya kekurangan atau kesalah pahaman selagi program ini dilakukan dan berusaha

konsisten dalam membagikan informasi mengenai program layanan Loker Prioritas dengan akurat agar dalam pelaksanaan implementasi ini tidak terjadinya penyimpangan khususnya untuk masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). *Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 193-204.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). *Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328-336.
- Menteri ATR/Kepala BPN: *Inovasi Layanan Pertanahan Harus Terus Ditingkatkan*. (2022). <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2735/menteri-atrkepala-bpn-inovasi-layanan-pertanahan-harus-terus-ditingkatkan>
- Menteri ATR/BPN *Buka Loker Prioritas Khusus Bagi Yang Ingin Urus Tanah Tanpa Calo*. (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/15190801/menteri-atr-bpn-buka-loket-prioritas-khusus-bagi-yang-ingin-urus-tanah-tanpa>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan*
- Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*. (2018)
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah*
- Setyaningrum, Erna. (2009). *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Medika Aksara Globalindo.

---

## Jurnal

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**17** %  
SIMILARITY INDEX

**17** %  
INTERNET SOURCES

**4** %  
PUBLICATIONS

**5** %  
STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

**1** **aksiologi.org** 2 %  
Internet Source

---

**2** **www.scribd.com** 2 %  
Internet Source

---

**3** **repository.unair.ac.id** 1 %  
Internet Source

---

**4** **adoc.pub** 1 %  
Internet Source

---

**5** **Submitted to Universitas Musamus Merauke** 1 %  
Student Paper

---

**6** **Submitted to Universitas Riau** 1 %  
Student Paper

---

**7** **vdocuments.site** 1 %  
Internet Source

---

**8** **jurnalbhumi.stpn.ac.id** 1 %  
Internet Source

---

**9** **insanpelajar.com** 1 %  
Internet Source

---

10	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
11	123dok.com Internet Source	<1 %
12	www.tempatwisata.pro Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
14	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
16	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
18	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
19	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
20	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %

21	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://skripsi-anthogoodwill-stiabone.blogspot.com">skripsi-anthogoodwill-stiabone.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.jojonomic.com">www.jojonomic.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.swaranews.co.id">www.swaranews.co.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



## Lampiran 8. Landasan Hukum

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2020



**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043];

3. Undang-Undang . . .

SK No 025052 A

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;
- Berpendapat : a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhaniaan Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar.
- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
- e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu difetakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

# PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

## **Lampiran 9. Riwayat Hidup**

### **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Yusuf Ramadhan Adikara
2. Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Januari 2000
3. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Raya Ketintang Selatan 27
4. Nomor Telepon/Handphone : 085791962736
5. E-mail : adikarayusuframa@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan
  - Pendidikan Formal
    - a. Tahun 2005 – 2006 : TK Dharmawanita Sidoarjo
    - b. Tahun 2006 – 2012 : SDN Sidokare IV Sidoarjo
    - c. Tahun 2012 – 2015 : SMPN 21 Surabaya
    - d. Tahun 2015 – 2018 : SMAN 10 Surabaya
7. Riwayat Pekerjaan  
-
8. Pengalaman Magang
  - a. Tahun 2022 : Administrasi Kepegawaian BPN Provinsi Jawa Timur
9. Prestasi
  - a. Tahun 2023 : Peraih Beasiswa Skripsi Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya